

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan (*financial statements*) biasanya digunakan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang nantinya dapat membuat nilai investasi yang dialirkan pada investor lebih maksimal. Sedangkan bagi pihak kreditur, laporan keuangan digunakan untuk memutuskan pinjaman dan bunga yang dibayarkan dan dibagi kepada pemerintah. Kegunaan lain dari laporan keuangan adalah sebagai media komunikasi menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak internal dan eksternal.

Pihak internal adalah manajemen perusahaan yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan, dan pihak internal adalah pemegang saham, kreditur, pemerintah yang diperlukan untuk mengabil keputusan berdasarkan hasil informasi keuangan untuk memperoleh pajak yang digunakan untuk dana pembangunan (**Suwanti, 2017**).

Bagi pihak eksternal laporan keuangan merupakan salah satu sumber untuk mengukur kinerja perusahaan, dan kinerja manajemen dapat dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Informasi laba biasanya digunakan oleh pihak manajemen dalam mencapai tujuan dengan cara merekayasa namun secara legal, hal inilah yang disebut dengan istilah manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (**Gunawan, dkk.,2015**).

Fenomena manajemen laba di Indonesia telah terjadi pada beberapa perusahaan besar, contohnya pada PT. Timah (Persero), Tbk. (TINS) memberikan informasi kondisi keuangan Perusahaan yang berbeda kepada publik dari yang sebenarnya terjadi, dimana sejak tahun 2013 direksi PT. Timah (Persero), Tbk. (TINS) menurut Ikatan Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian semasa menjabat selama tiga tahun sejak 2013 lalu, yaitu dengan memberikan informasi yang berbeda kepada publik mengenai pencapaian kondisi keuangan perusahaan sehingga merelluupka menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media. Contohnya adalah pada press release laporan keuangan semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada semester I-2015 laba operasi rugi sebesar Rp.59 miliar. Hal ini dilakukan tentu agar kinerja perusahaan dinilai baik oleh publik sehingga dapat menarik minat investor pada perusahaan. Sebagai informasi, selain mengalami penurunan laba, PT. Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100 persen dibanding 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp.263 miliar. Namun, jumlah utang ini meningkat pada tahun 2015.¹

Penerapan manajemen laba juga dapat membuat calon investor dan kreditur merasa dirugikan. Karena terjadinya kegagalan dalam menentukan nilai perusahaan dengan tepat oleh para investor saat dilakukannya penawaran saham perdana (IPO) dan menyebabkan terjadi kesalahan mengalokasikan dana terhadap perusahaan yang memang prospektif ke perusahaan yang tidak prospektif.

Sedangkan bagi calon kreditur adanya kesalahan dalam mengambil keputusan dimana seharusnya mereka tidak memberikan kredit, dan akhirnya hanya menimbulkan kredit macet pada perusahaan tersebut.

Dari fenomena diatas dapat kita ketahui bahwa manajemen laba sudah sering terjadi di Indonesia bahkan juga di dunia, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, salah satunya Perencanaan pajak (*Tax planning*). **Scot (2015)** mengatakan bahwa salah satu motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan. Seperti yang sudah diketahui bahwasannya salah satu sektor pajak yang besar diperoleh oleh negara adalah pajak penghasilan. Oleh sebab itu, perusahaan selaku wajib pajak badan seringkali melakukan perencanaan pajak agar menekan beban pajak yang harus dibayarkan secara legal. Ada tiga cara untuk menekan jumlah pajak yaitu tax avoidance, tax evasion dan tax saving. Menurut peraturan perundang-undangan yang legal hanya tax avoidance dan tax saving. Namun pada kenyataannya tax evasion masih dilakukan untuk menekan pembayaran pajak walaupun illegal.

Menurut Endriati (2017), perusahaan akan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal dan juga untuk keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Sehingga untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk

dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Manajemen laba juga dipengaruhi *Corporate Governance*, yang dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan agar tetap menjalankan segala usahanya dengan baik masing-masing hak dan kewajiban (**Rahardi, 2014**). Didalam *Corporate Governance* ini terdapat beberapa bagian, diantaranya etnis dewan komisaris dan dewan komisaris independen.

Indonesia adalah bangsa yang beragam yang ditandai dengan keragaman etnis, ras, budaya, suku dan bahasa. Karna hal tersebut sering terjadi konflik di Indonesia yang disebabkan oleh keragaman tersebut. Ada lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia. atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Dan jika dikaitkan dengan *board diversity* yaitu etnis dewan komisaris telah dibahas oleh **Sugiyono (2010)** bahwa keadaan di Indonesia keberadaan etnis Tionghoa, bahkan diakui telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan perekonomian bangsa. Dan tidak teori cukup sah yang bisa menunjukkan dengan pasti apa yang membuat etnis Tionghoa sukses dalam bisnis.

Selanjutnya yaitu dewan komisaris independen, adanya keberadaan istilah dari komisaris independen tersebut muncul karna adanya Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tgl. 21 Juli 2001 dan terbitnya Surat Edaran Bapepam yaitu Nomor : SE03/PM/2000. Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektifitas dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas dan remunerasi. Independensi akan timbul dengan adanya komisaris

independensi dalam perusahaan. Peran dari dewan komisaris perusahaan menjadi lebih penting semenjak adanya krisis moneter. Kinerja yang menurun, dewan komisaris seharusnya menjadi lebih aktif untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan. Dewan komisaris di Indonesia sering bertindak pasif bahkan sama seakli tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris sering dianggap tidak memiliki manfaat. Bahkan hal ini dapat dilihat pada fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya sehingga memberi kesempatan untuk terjadinya manajemen laba (FCGI,2012).

Menurut penelitian **Setyawan & Harnovinsah (2014)**, perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh **Dewi, dkk (2018)** menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh simultan terhadap manajemen laba. Menurut penelitian dari **Masliza & Mohammad (2016)** menyatakan bahwa jumlah anggota etnis yang lebih tinggi di dewan berhubungan positif dengan manajemen laba.

Tri (2016) melalui penelitiannya ditemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh **Clarissa (2016)** yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “**Pengaruh Perencanaan Pajak, Etnis Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Independent Terhadap Manajemen Laba dengan Leverage Sebagai Variabel**

Kontrol yang Pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di BEI 2015-2017”.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memberikan informasi kondisi keuangan perusahaan yang berbeda kepada publik dari yang sebenarnya terjadi.
2. Penerapan manajemen laba membuat calon investor dan kreditur merasa dirugikan. Karena kesalahan para investor mengalokasikan dana pada perusahaan yang tidak prospektif dan para kreditur dalam pemberian kredit yang hanya menimbulkan kredit macet.
3. Menurut peraturan perundang-undangan untuk menekan pembayaran pajak secara legal hanya tax avoidance dan tax saving. Namun pada kenyataannya tax evasion masih dilakukan untuk menekan pembayaran pajak walaupun illegal.
4. Indonesia adalah bangsa yang beragam yang ditandai dengan keragaman etnis, ras, budaya, suku dan bahasa. Karna hal tersebut sering terjadi konflik di Indonesia yang disebabkan oleh keragaman tersebut.
5. Masih terdapat dewan komisaris independen yang tidak menunjukkan independensinya sehingga memberi kesempatan manajemen melakukan manajemen laba.

1.3. Batasan Masalah

Dalam setiap pembahasan suatu permasalahan, perlu diadakan pembatasan agar dalam penulisan ini lebih terarah dan teratur. Karena adanya keterbatasan waktu tenaga dan kemampuan, maka pembahasan dibatasi hanya menganalisis pengaruh perencanaan pajak, etnis dewan komisaris, dan dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI ?
2. Bagaimanakah pengaruh etnis dewan komisaris terhadap manajemen laba perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimanakah pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI?
4. Bagaimanakah pengaruh perencanaan pajak, etnis dewan komisaris, dan dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan nonkeuangan di BEI ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dapat diperoleh ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etnis dewan komisaris terhadap manajemen laba pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak, etnis dewan komisaris, dan dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan pajak, etnis dewan komisaris, dan dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada

perusahaan nonkeuangan dan sarana pelatihan untuk mengaplikasikan teori perkuliahan yang telah didapatkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan bisa menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan Terkait

Dapat sebagai bahan informasi mengenai pentingnya pengaruh pengaruh perencanaan pajak, etnis dewan komisaris, dan dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan nonkeuangan.

